

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi pergeseran paradigma dalam dunia bisnis. Perusahaan kini tidak semata-mata berfokus pada perolehan laba, tetapi juga mulai menerapkan konsep *Pentuple Bottom Line* (PBL) yang merupakan pengembangan dari *triple bottom line*, mencakup aspek *profit*, *planet*, *people*, *prophet* dan *phenotechnology* (Purnomo et al., 2023). Lebih lanjut, dari kelima aspek tersebut, tiga di antaranya yaitu *planet*, *people* dan *prophet* menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap aspek lingkungan, masyarakat, serta nilai etika dan spiritual.

Transformasi ini menunjukkan bahwa perusahaan kini dipandang sebagai entitas yang tidak hanya berfokus pada pemegang saham, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholder*. Apabila keseimbangan kepentingan tersebut tercapai, maka perusahaan berpeluang memperoleh dukungan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pangsa pasar, penjualan, serta profitabilitas perusahaan (Ng et al., 2021).

Di negara Indonesia, perubahan paradigma ini diperkuat pula oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk regulasi OJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang berisi kewajiban penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik terkait penyampaian rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB), laporan berkelanjutan, mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial dan

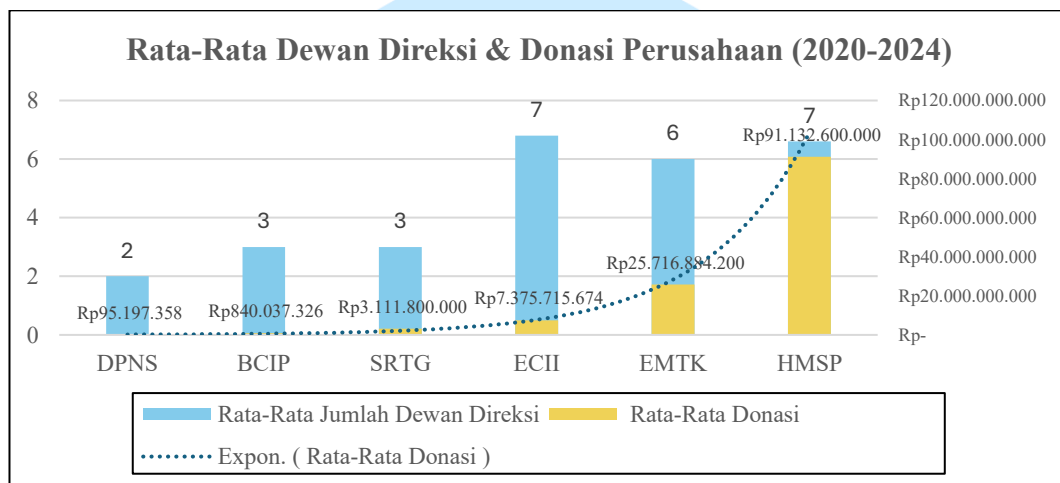
lingkungan (TJSL), pemberian insentif serta sanksi bagi entitas yang melanggar. Dengan kata lain, perusahaan dituntut untuk menjalankan operasi bisnisnya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial seperti yang diamanatkan oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang umum dilakukan oleh perusahaan adalah melalui donasi, dalam konteks bisnis dikenal dengan *corporate philanthropy*. Donasi dipandang sebagai pendekatan yang langsung dan efektif untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan (Ananzeh et al., 2023). Bentuk donasi beraneka ragam, mulai dari kontribusi uang, barang, program sosial dan amal, serta bantuan bencana alam. Saat ini pemberian donasi menjadi isu strategis, karena perusahaan semakin berupaya untuk menunjukkan perannya sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial (Indriyani dan Sudaryati, 2020).

Motivasi pemberian donasi tidak hanya untuk memperoleh keunggulan strategis seperti peningkatan citra perusahaan, penguatan loyalitas konsumen, dan perbaikan reputasi perusahaan. Tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan implementasi nyata dari tiga aspek *pentuple bottom line* yaitu kontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*), kepedulian terhadap masyarakat (*people*), serta tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan bisnis (*prophet*).

Meskipun perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sosial, yang dalam konteks penelitian ini tercermin dalam nominal donasi, realisasinya menunjukkan adanya perbedaan

antarperusahaan. Terdapat perusahaan yang secara konsisten mengalokasikan dana dalam jumlah yang besar untuk kegiatan sosial, sementara perusahaan lain menunjukkan kontribusi yang relatif lebih kecil sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1, Gambar 1.2 dan Gambar 1.3.



Gambar 1. 1 Chart Rata-Rata Donasi dan Jumlah Dewan Direksi Perusahaan Tahun 2020-2024

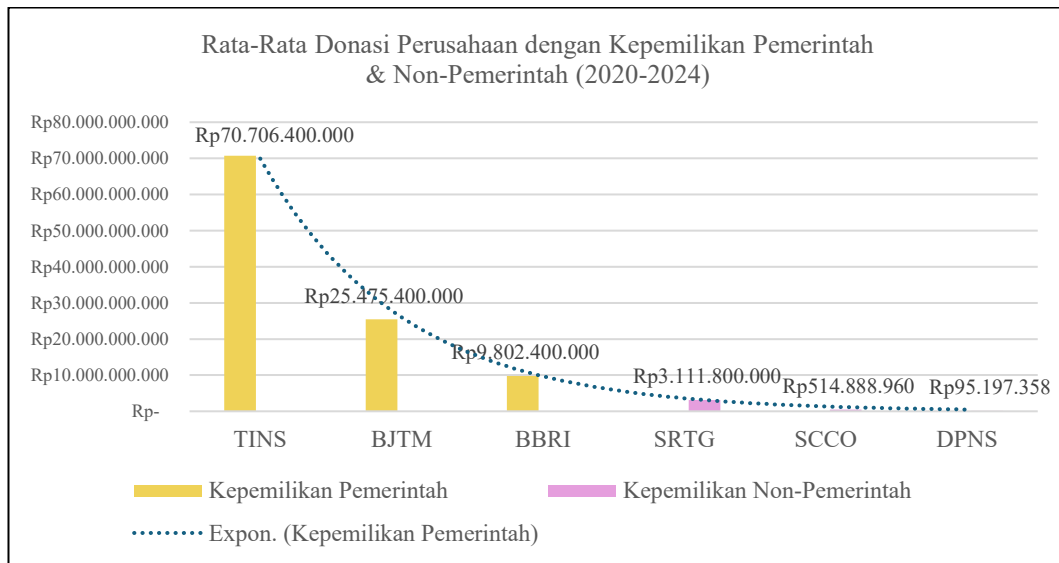
Berdasarkan Gambar 1.1, terdapat indikasi bahwa perusahaan dengan jumlah dewan direksi yang lebih besar menyalurkan donasi dalam jumlah lebih tinggi. Hal ini tampak pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) yang memiliki 6-8 anggota dewan direksi dan mencatat nilai rata-rata donasi tertinggi, yaitu sebesar Rp91,13 miliar. Selanjutnya, Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) dengan 6 anggota dewan direksi dan rata-rata donasi Rp25,72 miliar, diikuti PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) dengan 6-7 anggota dewan direksi menyalurkan donasi dengan rata-rata Rp7,38 miliar.

Sebaliknya, perusahaan dengan jumlah dewan direksi yang lebih sedikit cenderung memiliki tingkat donasi yang lebih rendah. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) yang memiliki 3 anggota dewan direksi menyalurkan donasi dengan rata-rata Rp3,11 miliar, sedangkan PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIP) dengan jumlah dewan direksi yang sama mencatat donasi sebesar Rp840 juta. Adapun PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) yang hanya memiliki 2 anggota dewan direksi mencatat tingkat donasi terendah, yaitu rata-rata Rp95,2 juta.

Selain ukuran dewan direksi, perbedaan donasi antarperusahaan juga tampak pada perusahaan dengan struktur kepemilikan saham yang berbeda. Fenomena tersebut juga tercermin pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3 yang menyajikan perbandingan donasi antara perusahaan dengan kepemilikan pemerintah dan non-pemerintah selama periode 2020-2024.

PERUSAHAAN	KODE	DONASI					RATA-RATA
		2024	2023	2022	2021	2020	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	Rp 888,000,000	Rp 363,000,000	Rp28,361,000,000	Rp 10,143,000,000	Rp 9,257,000,000	Rp 9,802,400,000
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	BJTM	Rp27,414,000,000	Rp25,828,000,000	Rp31,568,000,000	Rp 19,684,000,000	Rp22,883,000,000	Rp 25,475,400,000
Timah Tbk	TINS	Rp44,128,000,000	Rp59,527,000,000	Rp65,947,000,000	Rp101,790,000,000	Rp82,140,000,000	Rp 70,706,400,000
Saratoga Investama Sedaya Tbk	SRTG	Rp 1,237,000,000	Rp 1,491,000,000	Rp 1,229,000,000	Rp 1,388,000,000	Rp10,214,000,000	Rp 3,111,800,000
PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk	SCCO	Rp 375,105,715	Rp 272,756,720	Rp 1,164,495,880	Rp 251,019,848	Rp 511,066,636	Rp 514,888,960
Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	Rp 29,650,000	Rp 80,720,457	Rp 52,843,332	Rp 163,315,201	Rp 149,457,800	Rp 95,197,358

Gambar 1. 2 Donasi Perusahaan dengan Kepemilikan Pemerintah dan Non-Pemerintah Tahun 2020-2024



Gambar 1. 3 Chart Rata-Rata Donasi Perusahaan dengan Kepemilikan Pemerintah dan Non-Pemerintah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 1.2 dan Gambar 1.3, dapat diketahui bahwa Timah Tbk (TINS), Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah menyalurkan donasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk (SCCO), dan PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) yang sahamnya tidak dimiliki pemerintah.

Perbedaan tingkat donasi sebagaimana tampak pada Gambar 1.1, Gambar 1.2 dan Gambar 1.3 mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor internal perusahaan yang memengaruhi keputusan dalam menyalurkan donasi. Faktor-faktor yang diduga memengaruhi keputusan tersebut adalah ukuran dewan direksi dan kepemilikan pemerintah, yang dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel independen terhadap donasi perusahaan sebagai variabel dependen.

Dewan direksi merupakan bagian dari tata kelola perusahaan, yang bertanggung jawab dalam memastikan pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang strategis. Ukuran dewan direksi yang lebih besar cenderung menghadirkan perspektif yang beragam, meningkatkan dorongan moral dalam pengambilan keputusan dan memperluas pengungkapan informasi CSR (Wilda et al., 2023), termasuk penentuan donasi perusahaan.

Sementara itu, kepemilikan saham pemerintah mencerminkan keterlibatan negara dalam struktur kepemilikan perusahaan. Secara implisit, kepemilikan pemerintah merepresentasikan perusahaan sebagai entitas yang dimiliki oleh masyarakat luas (Rizky & Yuyetta, 2015), sehingga perusahaan tersebut cenderung menghadapi ekspektasi yang lebih tinggi dari pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial sebagai wujud peran negara dalam kesejahteraan publik sekaligus menjadi contoh bagi entitas bisnis lainnya. Oleh sebab itu, kepemilikan pemerintah diduga mampu mendorong perusahaan untuk menyalurkan donasi dalam jumlah yang lebih besar.

Meskipun telah banyak penelitian di Indonesia yang membahas faktor-faktor perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial, sebagian besar studi tersebut berfokus pada aspek pengungkapan dalam laporan tahunan atau keberlanjutan, bukan pada implementasi nyata seperti donasi yang disalurkan, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Oktaviani et al. (2024), Rizky dan Yuyetta (2015), Ramadhani dan Maresti (2021), serta Nugroho dan Witono (2025). Padahal, donasi perusahaan tidak hanya merepresentasikan aktivitas sosial yang

diungkapkan kepada publik, tetapi juga mencerminkan realisasi komitmen sosial perusahaan secara langsung kepada masyarakat.

Di Indonesia, penelitian yang secara khusus membahas donasi perusahaan sebagai bentuk *corporate philanthropy* masih tergolong terbatas. Salah satu penelitian yang mengkaji topik tersebut dilakukan oleh Indriyani dan Sudaryati (2020) yang menganalisis pengaruh keragaman gender dewan, jenis industri serta ukuran perusahaan terhadap donasi CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman gender dewan dan jenis industri berpengaruh signifikan terhadap donasi, sementara ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor tata kelola perusahaan memiliki peran dalam menentukan kebijakan donasi. Namun demikian, penelitian tersebut belum mempertimbangkan faktor lain seperti ukuran dewan direksi dan kepemilikan pemerintah. Keterbatasan penelitian terkait *corporate philanthropy* di Indonesia menunjukkan bahwa topik ini masih memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh ukuran dewan direksi dan kepemilikan pemerintah terhadap donasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2 Rumusan Masalah

Perbedaan tingkat donasi antarperusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mencerminkan bahwa kebijakan penyaluran donasi dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan. Dalam konteks tata kelola perusahaan, ukuran dewan direksi diduga memengaruhi kebijakan sosial perusahaan melalui

keberagaman perspektif dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, kepemilikan pemerintah dapat meningkatkan tekanan legitimasi dan ekspektasi publik terhadap kontribusi sosial perusahaan. Namun demikian, penelitian empiris yang secara khusus menguji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap donasi perusahaan di Indonesia masih terbatas, karena sebagian besar studi CSR lebih berfokus pada aspek pengungkapan dibandingkan realisasi donasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap donasi perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2018-2024?
2. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap donasi perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2018-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan direksi dan kepemilikan pemerintah terhadap donasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian 2018-2024. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam

menyalurkan donasi serta pengembangan literatur terkait filantropi perusahaan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan direksi dan kepemilikan pemerintah terhadap donasi perusahaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan tiga manfaat yaitu secara teoritis, praktis maupun kebijakan.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan literatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya terkait praktik donasi perusahaan serta faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti ukuran dewan direksi dan kepemilikan pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang membahas topik serupa.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan gambaran bagi perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran donasi perusahaan, khususnya terkait ukuran

dewan direksi dan kepemilikan pemerintah, sehingga dapat menambah informasi bagi perusahaan terkait pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan.

3. Manfaat kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti regulator atau pemegang saham dalam mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya terkait praktik penyaluran donasi perusahaan.

